

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Akuntansi secara umum dibutuhkan sebagai alat pencatatan transaksi dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena akuntansi juga berperan penting sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Ivana, 2021). Pada akuntansi pemerintahan, kegiatan dapat dilakukan secara lancar dan tersusun rapi, jika dalam pemerintahan tersebut tercipta suatu sistem yang baik, efektif, dan efisien, serta dapat membantu dalam pelaksanaan, pengawasan, ataupun dalam tiap aktivitas pemerintahan tersebut. Pelaksanaan sistem yang baik ini akan mencerminkan pemerintahan yang profesional (Muliadi, 2018). Menurut PSAP No 01 tentang penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan juga saldo simpanan di bank yang merupakan sumber dana dan setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di pemerintahan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No 14 tentang akuntansi kas, kas merupakan aset pemerintah yang paling lancar dan aktif. Kas dikatakan lancar karena, kas mudah untuk di ubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban dari pemerintah. Kas merupakan aset lancar paling aktif karena, semua transaksi yang dilakukan pemerintah berhubungan dengan penerimaan kas dan juga pengeluaran kas. Dengan demikian, kas merupakan sumber dana yang diperoleh pemerintah (Agus & Madya, 2015).

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang merupakan konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintah yang baik. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki tugas utamanya yaitu mengelola keuangan. Dalam mengelola keuangan serta pengelolaan asset milik daerah, khususnya dalam mengelola aset, terdapat langkah-langkah, tahapan dan proses yang sudah ditetapkan oleh pemerintah setempat sehingga tidak sembarangan dalam mengajukan perencanaan pembelian asset sampai dengan pemeliharaannya.

Dalam melakukan perencanaan kebutuhan barang milik daerah, terdapat langkah-langkah, tahapan dan proses, yaitu pengguna barang menghimpun usulan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) yang diajukan oleh kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan perangkat daerah yang dipimpin, pengelola barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) bersama pengguna barang dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan / pengelola barang, RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) yang sudah ditetapkan oleh pengelola barang digunakan oleh pengguna barang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran perangkat Daerah. Untuk prosedur penerimaan barang milik daerah yaitu pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan BMD (Barang Milik Daerah) kepada Walikota melalui pengelola barang untuk ditetapkan status penggunaannya, laporan hasil penerimaan barang ini terdiri dari laporan hasil penerimaan bulanan, semesteran, dan tahunan. Untuk prosedur yang terakhir yaitu prosedur pemeliharaan barang milik daerah yaitu pengelola barang, pengguna barang / kuasa pengguna barang wajib melakukan pemeliharaan BMD (Barang

Milik Daerah) yang berada dalam penguasaannya, pemeliharaan ini meliputi pemeliharaan fisik, administrasi, dan hukum. Bukti kepemilikan wajib disimpan dengan tertib dan aman, penyimpanan bukti kepemilikan BMD (Barang Milik Daerah) ini dilakukan oleh pengelola barang, biaya pemeliharaan BMD (Barang Milik Daerah) dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) (Perwali.Malang, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis membuat laporan praktik kerja lapangan (PKL) mengenai prosedur perencanaan kebutuhan, penerimaan, dan pemeliharaan barang milik daerah pada Badan Keuangan Aset dan Daerah Kota Malang yang berlokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Dengan demikian, penulis tertarik untuk menulis laporan praktik kerja lapangan (PKL) dengan judul **“Analisis Prosedur Perencanaan Kebutuhan, Penerimaan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Aset dan Daerah Kota Malang Ditinjau Dari Sudut Pandang Akuntansi”**.

## **1.2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

Terdapat beberapa tujuan dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi beberapa pihak antara lain, sebagai berikut:

### 1. Bagi Mahasiswa

- 1) Menambah pengetahuan tentang prosedur perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang ditinjau dari sudut pandang akuntansi.
- 2) Menambah pengetahuan tentang prosedur penerimaan Barang Milik Daerah yang ditinjau dari sudut pandang akuntansi

3) Menambah pengetahuan tentang prosedur pemeliharaan Barang Milik Daerah yang ditinjau dari sudut pandang akuntansi.

## 2. Bagi Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung

1) Sebagai bahan evaluasi kesesuaian antara bahan pengajaran dari akademis dengan dunia pekerjaan, khususnya pada bidang akuntansi sektor publik, agar program studi akuntansi universitas ma chung dapat semakin lebih baik membekali para mahasiswa terkait pengetahuan pada bidang akuntansi sektor publik.

2) Sebagai wadah untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memahami teori-teori akuntansi pada bidang akuntansi sektor publik yang telah diajarkan.

3) Sebagai sarana untuk memperoleh informasi mengenai keadaan umum pada kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang.

## 3. Bagi Instansi

1) Sebagai sarana untuk dapat memperkenalkan dunia pekerjaan mengenai akuntansi pemerintahan secara nyata kepada mahasiswa.

2) Sebagai sarana untuk mengetahui potensi diri dan kualitas mahasiswa dari Universitas Ma Chung, khususnya pada program studi akuntansi.

3) Sebagai sarana untuk membina hubungan kerjasama yang baik dengan Universitas Ma Chung, khususnya pada program studi akuntansi.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

Terdapat beberapa manfaat dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi beberapa pihak antara lain, sebagai berikut:

### 1. Bagi Mahasiswa

- 1) Memperoleh pengetahuan mengenai prosedur perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ditinjau dari sudut pandang Akuntansi.
- 2) Memperoleh pengetahuan mengenai prosedur penerimaan Barang Milik Daerah ditinjau dari sudut pandang Akuntansi.
- 3) Memperoleh pengetahuan mengenai prosedur pemeliharaan Barang Milik Daerah ditinjau dari sudut pandang Akuntansi.

### 2. Bagi Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung

- 1) Dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak instansi melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- 2) Memeroleh gambaran kemampuan mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sehingga mampu meningkatkan kualitas pengajaran.
- 3) Memeroleh gambaran terkait kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.

### 3. Bagi Instansi

- 1) Dapat membina hubungan kerja sama yang baik dengan pihak Universitas Ma Chung, khususnya pada program studi akuntansi.
- 2) Mengetahui kemampuan dan kualitas mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan, khususnya pada materi akuntansi sektor publik.
- 3) Instansi dapat menjadi referensi bagi kalangan mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan ingin

memerluas wawasan mengenai akuntansi sektor publik atau dapat menjadi referensi tempat kerja.